



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Sistem Jalan Berbayar Ditargetkan Beroperasi Mei 2019

Beriringan dengan pengoperasian MRT.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA — Pemerintah DKI Jakarta memastikan sistem jalan berbayar elektronik *electronic road pricing* (ERP) akan beroperasi pada Mei tahun depan. Sistem ERP akan diterapkan mulai dari Jalan Sisingamangaraja (Jakarta Selatan), Jenderal Sudirman, hingga Bundaran Hotel Indonesia (Jakarta Pusat).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menuntaskan lelang investasi proyek jalan berbayar masih sesuai dengan jadwal. Penandatanganan kontrak dengan pemenang lelang dijadwalkan pada 25 Oktober mendatang. "Masih *on the track*," ujar Sandiaga di Jakarta, Jumat lalu.

Menurut Sandiaga, pencrapan sistem ERP akan beriringan dengan

pengoperasian kereta *mass rapid transit* (MRT) Fase 1, Tebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia. "Begitu MRT selesai, kami ingin ERP bisa beroperasi," kata Sandiaga. Adapun MRT diperkirakan beroperasi pada Maret tahun depan.

Sebelumnya, Sandiaga mengatakan optimal atau tidaknya jaringan MRT akan sangat bergantung pada kelengkapan sistem ERP. Setelah sistem ERP diterapkan, pengguna kendaraan pribadi diharapkan beralih ke angkutan umum massal seperti MRT.

Lelang ERP telah memasuki tahap penawaran administrasi dan teknis. Dari 143 peserta yang mengikuti lelang investasi itu, hanya PT Bali Towerindo Sentra, Kapsch Traffic Com AB, dan Q Free ASA, yang lolos seleksi dokumen tender.

Lelang sistem jalan berbayar itu sempat gagal beberapa kali. Februari

lalu misalnya, lelang kembali diulang lantaran peserta yang lulus pra kualifikasi kurang dari tiga perusahaan.

Sandiaga menjelaskan Kapsch dan Q Free pernah menguji coba teknologi sistem ERP di jalan protokol Ibu Kota. Perusahaan asal Swedia dan Norwegia itu menguji coba ERP dengan teknologi *dedicated short-range communication* (DSRC) di Jalan Sudirman dan Jalan Rasuna Said pada 2014.

Sandiaga menargetkan sistem ERP juga bisa diterapkan di Jalan M.H Thamrin, Medan Merdeka Barat, Gadjah Mada, Hayam Wuruk, dan Rasuna Said pada 2020. "Tapi kedua (ERP beroperasi) pada Mei 2020," katanya.

Komisioner Pengawas Persaingan Usaha, Guntur Syahputra Saragih, mengingatkan pemerintah DKI agar berhati-hati dalam pelaksanaan lelang

ERP. Menurut dia, lelang seharusnya bisa memberikan kesempatan bagi semua pengusaha untuk berkompetisi menunjukkan kualitas produknya. "Jangan sampai memberikan *barrier*," tutur Guntur.

Pernyataan Guntur merujuk pada Peraturan Gubernur DKI Nomor 25 Tahun 2017. Pasal 15 ayat 1 peraturan itu menyebutkan perangnya ERP telah digunakan dalam pengendalian lalu lintas melalui sistem jalan berbayar pada ruas jalan, koridor, atau kawasan perkotaan di dunia. Pasal ini diengarahi membuat kesempatan pengusaha untuk mengikuti lelang jalan berbayar itu.

Sandiaga mengklaim proses lelang ERP berjalan transparan dan adil. Pemerintah DKI tidak menyebutkan jenis dan merek teknologi yang akan digunakan. Hanya menyebutkan prinsip skema bisnis dan *key performance*

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Sistem Jalan Berbayar Ditargetkan Beroperasi Mei 2019

indicator" tuturnya.

Menurut Sandiaga, tertalu berisiko bila pemerintah DKI menggunakan teknologi ERP yang belum pernah teruji di negara lain.

"Kami tidak mau nanti ada (perusahaan) yang tidak berpengalaman ikut, akhirnya mereka enggak bisa mengoperasikan (alat ERP)," kata dia. ●

Cerita Panjang Jalan Berbayar

Lelang pembangunan sistem ERP yang diperkirakan merelan biaya sekitar Rp 2-3 triliun memasuki tahap penawaran administratif dan teknis. Sebelumnya, lelang itu pernah diulang beberapa kali. Berikut kronologinya:

➤ 2014

- Juli, PT Aita Praya Mitra menguji coba ERP berteknologi *dedicated short range communications* (DSRC) frekuensi 5,8 GHz (Kapsch) di jalur tol Jalan Jenderal Sudirman. Uji coba berjalan sampai 2016.
- September, Perusahaan asal Norwegia, Q-Free, menguji coba ERP berteknologi DSRC di Jalan H.R. Ruseffendi Said.

➤ 2016

- Peraturan Gubernur DKI Nomor 149 Tahun 2016 tentang Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik terbit.
- 29 Juli, Lelang ERP dimulai.
- Oktober, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mempersoalkan Pasal 5 ayat 1 huruf C Peraturan Gubernur Nomor 149/2016. Pasal itu menyatakan ERP menggunakan teknologi komunikasi jarak pendek atau DSRC frekuensi 5,8 GHz. Menurut KPPU, pasal tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Anti-Monopoli.

➤ 2017

- Januari, KPPU dan pemerintah DKI sajakal lelang ERP ditulang.
- 6 Maret, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menandatangani Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengendalian Lalu Lintas dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik. Syarat teknologi DSRC 5,8 GHz dihapus.
- 22 Juni, Lelang ERP dimulai lagi.

➤ 2018

- 15 Januari, Panitia Pengadaan Barang Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik menyampaikan kepada peserta lelang bahwa lelang dibatalkan karena jumlah peserta yang lolos pra kualifikasi kurang dari tiga perusahaan.
- 17 Januari, Pengumuman hasil pra kualifikasi lelang ERP.
- 9 Februari, Peraturan gubernur tentang ERP kembali diadakan ke KPPU.

● GAMBAR PAREKBIT